**Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dalam Era Digital melalui Implementasi E-Government dan Good Governance untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

**Oleh :**

Adelia Anggraini

NPM 2416041124



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**LAMPUNG**

**2025**

# DAFTAR ISI

COVER i

[DAFTAR ISI ii](#_TOC_250003)

BAB I [PENDAHULUAN 1](#_TOC_250002)

* 1. Latar Belakang 1
  2. Rumusan Masalah 6
  3. Tujuan Penulisan 7
  4. Manfaat Penelitian 8
  5. Metode Penelitian 10

DAFTAR PUSTAKA 12

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada abad ke-21 telah membawa dampak signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan administrasi publik. Era digital menuntut pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat dalam penyediaan layanan publik, penyusunan kebijakan, dan pembangunan kapasitas birokrasi. Administrasi publik tidak lagi dipahami sebagai sistem birokrasi yang kaku dan hierarkis semata, tetapi sebagai sistem yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pergeseran ini menandai munculnya paradigma baru dalam administrasi publik, yaitu transformasi dari pendekatan tradisional menuju sistem yang berbasis teknologi digital, kolaboratif, dan partisipatif.

Secara global, transformasi administrasi publik melalui digitalisasi bukan fenomena baru. Laporan *United Nations E-Government Survey* menunjukkan bahwa negara-negara maju menempatkan digital government sebagai prioritas strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Contohnya, Estonia berhasil membangun sistem digital terpadu yang memungkinkan warganya mengakses hampir seluruh layanan pemerintahan secara daring, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perizinan usaha. Korea Selatan juga mengintegrasikan *e-government* dalam birokrasi secara efektif, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan legitimasi pemerintah. Keberhasilan negara-negara ini menunjukkan bahwa teknologi digital mampu mempercepat transformasi administrasi publik, asalkan diimbangi dengan prinsip *good governance*. OECD menekankan bahwa teknologi digital tanpa tata kelola yang baik justru dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses layanan dan risiko penyalahgunaan data publik.

Dalam konteks akademik, administrasi publik telah melalui perjalanan paradigma yang panjang. Supriyadi (2021) menjelaskan pergeseran dari *Old Public Administration* yang menekankan aturan dan hierarki, menuju *New Public Management* yang berorientasi pada efisiensi dan prinsip pasar, hingga berkembang ke *New Public Service* yang menekankan kolaborasi, partisipasi warga, dan pelayanan publik yang lebih responsif. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa administrasi publik selalu bertransformasi sesuai tuntutan zaman. Kehadiran era digital mempercepat transformasi tersebut, sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi birokrasi, baik secara teknis maupun sosial-politik.

Implementasi *e-government* merupakan wujud nyata dari transformasi ini. Secara konseptual, *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat transparansi, dan memperluas akses masyarakat. Gultom, Khairina, dan Salsabila (2024) menekankan bahwa *e-government* mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik. Layanan berbasis digital memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Di Indonesia, contoh nyata implementasi *e-government* meliputi SPBE, OSS, e-budgeting, serta layanan administrasi kependudukan daring. Namun, tantangan tetap ada, seperti disparitas digital antarwilayah, kesiapan sumber daya manusia, dan literasi teknologi masyarakat yang belum merata.

Selain teknologi, *good governance* menjadi pilar penting dalam administrasi publik modern. *Good governance* menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi birokrasi. Natalia (2022) menegaskan bahwa *good governance* berperan penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), karena menjamin bahwa kebijakan pembangunan berpihak pada masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan. Contoh implementasi *good governance* di Indonesia termasuk penguatan regulasi anti-korupsi, keterbukaan informasi publik, dan penyediaan mekanisme partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.

Sinergi antara *e-government* dan *good governance* menjadi kunci dalam membangun administrasi publik yang efektif dan berkelanjutan. Alamsyah, Ariesmansyah, dan Arifin (2025) menekankan bahwa digitalisasi mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat dari yang bersifat satu arah menjadi lebih kolaboratif. Hardjati (2023) menyoroti isu kontemporer seperti literasi digital, perlindungan data pribadi, dan etika digital yang harus diperhatikan agar digitalisasi tidak menciptakan risiko sosial. Khairudin et al. (2022) menegaskan bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama keberhasilan implementasi *e-government* dan *good governance*. Tanpa kepercayaan masyarakat, layanan digital berpotensi ditolak atau tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dalam konteks Indonesia, pergeseran paradigma administrasi publik di era digital memiliki urgensi tersendiri. Indonesia menghadapi tantangan berupa disparitas digital antarwilayah, budaya birokrasi tradisional yang kadang lamban, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya relatif maju, tetapi wilayah terpencil masih kesulitan mengakses layanan digital. Transformasi digital berpotensi menciptakan bias sosial jika tidak diimbangi prinsip *good governance* yang memastikan inklusivitas, partisipasi masyarakat, dan pemerataan akses.

Sejarah administrasi publik di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks. Pada era kolonial dan Orde Lama, birokrasi bersifat sentralistik dan terfokus pada kontrol pemerintahan. Orde Baru menekankan pembangunan top-down, efisiensi, dan kepatuhan struktural, tetapi kurang responsif terhadap partisipasi publik. Reformasi 1998 membuka ruang bagi desentralisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sehingga fondasi *good governance* mulai muncul. Era digital saat ini menjadi fase baru, di mana teknologi mempercepat interaksi pemerintah-masyarakat dan menuntut birokrasi untuk lebih adaptif.

Hubungan antara digitalisasi dan SDGs semakin menegaskan relevansi penelitian ini. SDG ke-16 (“Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh”) menuntut tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. SDG ke-9 (“Industri, Inovasi, dan Infrastruktur”) mendorong pembangunan infrastruktur digital. SDG ke-10 (“Pengurangan Ketimpangan”) menekankan pemerataan akses layanan. Implementasi *e-government* menyediakan instrumen teknis untuk mendukung tujuan-tujuan ini, sedangkan prinsip *good governance* memastikan proses digitalisasi tetap etis, inklusif, dan berpihak pada masyarakat.

Meski begitu, risiko digitalisasi juga nyata. Risiko tersebut meliputi otoritarianisme digital, pelanggaran privasi, diskriminasi akses, dan potensi korupsi baru melalui manipulasi data. Hal ini menuntut pemerintah untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan tata kelola yang etis. Hardjati (2023) menyebutkan bahwa aspek etika dan keamanan data harus menjadi prioritas agar *e-government* benar-benar mendukung administrasi publik yang berkualitas.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu menggali dinamika sosial, politik, dan budaya yang kompleks. Alamsyah et al. (2025) menyatakan bahwa digitalisasi administrasi publik melibatkan interaksi antara birokrasi, masyarakat, dan sektor swasta, sehingga pendekatan kualitatif relevan untuk memahami fenomena ini secara mendalam. Penelitian kualitatif memungkinkan analisis tentang persepsi masyarakat terhadap layanan digital, kesiapan birokrasi, hambatan sosial, dan implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang administrasi publik digital di Indonesia. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan digitalisasi yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Ketiga, secara sosial-normatif, penelitian ini mendukung pencapaian SDGs melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dengan landasan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pergeseran paradigma administrasi publik di era digital melalui *e-government* dan *good governance* bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga transformasi sosial-politik yang kompleks. Sinergi keduanya menjadi fondasi penting bagi terciptanya administrasi publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipandang sebagai metode yang paling sesuai untuk menangkap nuansa perubahan ini, memahami hambatan dan peluang, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan, baik untuk pengembangan ilmu administrasi publik, penguatan kapasitas birokrasi, maupun pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pergeseran paradigma administrasi publik, jika dikelola dengan baik melalui integrasi *e-government* dan *good governance*, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, penerapan e-government di Indonesia perlu dilihat dari perspektif partisipasi masyarakat. Keberhasilan layanan digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan memanfaatkan layanan tersebut. Literasi digital menjadi faktor kunci dalam hal ini, karena masyarakat yang mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dapat mempercepat tercapainya tujuan administrasi publik yang transparan dan responsif. Di sisi lain, rendahnya literasi digital berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang melek teknologi dan yang belum. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas masyarakat harus berjalan seiring dengan digitalisasi birokrasi.

Lebih jauh, integrasi e-government dan good governance memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*). Dengan memanfaatkan data yang terkumpul melalui sistem digital, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Gultom, Khairina, dan Salsabila (2024) menekankan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan administrasi publik dapat meningkatkan efektivitas program dan mengurangi risiko kegagalan kebijakan. Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar alat administrasi, tetapi juga instrumen strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Selain manfaat, transformasi digital menimbulkan tantangan etis dan keamanan. Hardjati (2023) menyoroti risiko pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu kepercayaan publik. Pemerintah harus mengembangkan regulasi dan mekanisme proteksi data yang kuat, serta menanamkan budaya etika digital di kalangan birokrasi. Pengelolaan risiko ini menjadi bagian penting dari *good governance*, karena tanpa perlindungan dan kepastian hukum, masyarakat akan ragu menggunakan layanan digital, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas administrasi publik secara keseluruhan.

Selain itu, pergeseran paradigma administrasi publik di era digital berdampak pada struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia (SDM) birokrasi. Aparatur pemerintah dituntut memiliki kemampuan digital, adaptif terhadap perubahan, dan mampu berinovasi dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Pelatihan, pengembangan kompetensi, dan rekrutmen berbasis kemampuan teknologi menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan birokrasi tetap relevan dan responsif. Alamsyah, Ariesmansyah, dan Arifin (2025) menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM sebagai fondasi keberhasilan integrasi e-government dan prinsip good governance.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pergeseran paradigma administrasi publik di era digital melalui implementasi e-government dan prinsip good governance menimbulkan berbagai fenomena dan tantangan yang perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perubahan administrasi publik, interaksi antara birokrasi dan masyarakat, serta hambatan dan peluang yang muncul dalam konteks transformasi digital di Indonesia.

1. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian sebagai berikut:
2. Bagaimana pergeseran paradigma administrasi publik di Indonesia terjadi dalam era digital?
3. Bagaimana implementasi e-government memengaruhi efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di Indonesia?
4. Bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam administrasi publik digital untuk mendukung pembangunan berkelanjutan?
5. Bagaimana interaksi antara e-government dan good governance membentuk administrasi publik yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan?
6. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam implementasi e-government dan good governance di Indonesia?

Rumusan masalah ini menjadi panduan bagi penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena transformasi administrasi publik secara mendalam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peluang, kendala, dan strategi yang relevan bagi birokrasi Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

* 1. **Tujuan Penulisan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pergeseran paradigma administrasi publik di Indonesia dalam era digital melalui implementasi *e-government* dan prinsip *good governance*, serta dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana digitalisasi birokrasi dan tata kelola yang baik mempengaruhi efektivitas layanan publik, partisipasi masyarakat, dan legitimasi pemerintah (Gultom, Khairina, & Salsabila, 2024).

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi dan pengalaman aparat birokrasi serta masyarakat terhadap penerapan *e-government* di berbagai sektor administrasi publik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa interaksi sosial, hambatan implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi digital dalam konteks lokal, sesuai dengan prinsip *good governance* (Alamsyah, Ariesmansyah, & Arifin, 2025; Hardjati, 2023).

Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi sejauh mana integrasi *e-government* dan *good governance* mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan pemerataan layanan publik (Natalia, 2022; Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis transformasi teknis administrasi publik, tetapi juga aspek sosial-politik dan normatif yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul selama proses digitalisasi birokrasi, seperti kesenjangan akses digital antarwilayah, kesiapan sumber daya manusia, dan literasi teknologi masyarakat. Pemahaman mendalam mengenai tantangan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, realistis, dan aplikatif bagi pemerintah Indonesia (Supriyadi, 2021; Gultom, Khairina, & Salsabila, 2024).

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu administrasi publik di era digital, memperkuat kapasitas birokrasi dalam mengelola transformasi digital, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan. Pendekatan kualitatif menjadi metode yang paling tepat untuk menangkap kompleksitas fenomena ini, sehingga hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat, baik dari segi akademik, praktis, maupun sosial. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait pergeseran paradigma administrasi publik di era digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mampu menggali fenomena sosial dan birokratis secara mendalam, seperti persepsi masyarakat terhadap layanan digital, kesiapan birokrasi, serta hambatan dan peluang implementasi e-government dan prinsip good governance (Alamsyah, Ariesmansyah, & Arifin, 2025; Supriyadi, 2021). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial-politik yang kompleks, yang sulit diukur dengan metode kuantitatif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan di pemerintah. Dengan memahami persepsi masyarakat dan kesiapan birokrasi, pemerintah dapat merumuskan strategi digitalisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Misalnya, implementasi SPBE, OSS, dan e-budgeting dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan literasi digital masyarakat serta kesiapan sumber daya manusia birokrasi (Gultom, Khairina, & Salsabila, 2024; Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah, 2022). Selain itu, penelitian ini juga memberikan masukan terkait praktik good governance yang mampu meningkatkan kepercayaan publik, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan (Natalia, 2022).

Dari perspektif sosial, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara e-government dan good governance yang dianalisis dalam penelitian ini dapat membantu pemerintah memastikan bahwa layanan publik tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs, seperti SDG ke-9 tentang inovasi dan infrastruktur, SDG ke-10 tentang pengurangan ketimpangan, dan SDG ke-16 tentang pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Hardjati, 2023).

Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dalam bidang administrasi publik dan digital governance. Analisis kualitatif yang dilakukan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi lebih jauh implementasi e-government di berbagai daerah, perbedaan kesiapan birokrasi antarwilayah, atau studi komparatif dengan negara lain yang telah berhasil melakukan transformasi digital dalam administrasi publik (Alamsyah, Ariesmansyah, & Arifin, 2025).

* 1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fenomena yang dikaji bersifat kompleks, kontekstual, dan memerlukan pemahaman mendalam terkait dinamika administrasi publik di era digital. Alamsyah, Ariesmansyah, dan Arifin (2025) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap interaksi sosial, persepsi, dan pengalaman aktor birokrasi maupun masyarakat dalam implementasi e-government dan prinsip good governance. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji perubahan paradigma administrasi publik yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial-politik, budaya, dan kelembagaan.

Fokus penelitian terletak pada pergeseran paradigma administrasi publik melalui integrasi e-government dan good governance untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Supriyadi (2021) menjelaskan bahwa perubahan paradigma dalam administrasi publik mencakup transformasi dari model birokrasi tradisional menuju sistem yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, metode kualitatif dipilih untuk menelusuri bagaimana transformasi ini terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah dalam konteks digitalisasi administrasi publik.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, antara lain wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan dengan aparatur pemerintah, pejabat pengelola layanan digital, serta masyarakat sebagai pengguna layanan e-government untuk memperoleh perspektif langsung mengenai efektivitas dan hambatan implementasi layanan digital (Gultom, Khairina, & Salsabila, 2024). Studi dokumen meliputi analisis kebijakan pemerintah, regulasi, laporan evaluasi SPBE, OSS, dan program penguatan good governance (Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah, 2022). Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti pelaksanaan layanan digital tertentu secara langsung untuk memahami proses dan interaksi yang terjadi antara birokrasi dan masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan tematik, di mana data dari wawancara, dokumen, dan observasi dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Natalia (2022) menekankan bahwa pendekatan tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kendala, dan strategi implementasi good governance yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, data dianalisis secara kritis untuk memahami hubungan antara digitalisasi birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kredibilitas dan validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan pemeriksaan anggota (member checking). Hardjati (2023) menyebutkan bahwa triangulasi penting untuk memastikan akurasi dan keandalan temuan, terutama dalam penelitian sosial-politik yang kompleks. Member checking dilakukan dengan meminta konfirmasi dari responden terkait interpretasi data yang dihasilkan sehingga temuan penelitian mencerminkan realitas lapangan secara akurat.

Dengan demikian, metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan pemahaman yang holistik mengenai pergeseran paradigma administrasi publik di era digital, interaksi antara e-government dan prinsip good governance, serta dampaknya terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual bagi pemerintah serta memperkaya literatur administrasi publik di era digital.

**Daftar Pustaka:**

Alamsyah, K., Ariesmansyah, A., & Arifin, R. K. (2025). *Administrasi publik di era digitalisasi*. Mega Press Nusantara.

Gultom, D. N., Khairina, E., & Salsabila, L. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas e-government dalam administrasi publik. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10*(1), 128–136.

Hardjati, S. (Ed.). (2023). *Governance di era digital: Isu-isu kontemporer* (Edisi ke-2). UPN "Veteran" Jawa Timur.

Khairudin, Soewito, Aminah, Haninun, & Nurdiawansyah. (2022). *Membangun kepercayaan publik di Indonesia: Peran good governance dan e-government*. CV. Amerta Media.

Natalia, A. (2022). Paradigma good governance dalam administrasi publik memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam, 18*(1), 15–26.

Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran dalam paradigma ilmu administrasi publik. *Jurnal Rasi, 3*(1).